

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/6512.
TANGGAL : 7 Juli 2017.

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang Profil Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya dan Pimpinan OPD						
a.	Visi dan Misi	KA. Sub. Bag Program	Kepala Dinas	Pembuatan 2013 dan Perubahan 2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
b.	Tugas Pokok dan Fungsi	KA. Sub. Bag Program	Kepala Dinas	Pembuatan 2013 dan Perubahan 2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
c.	Struktur Organisasi dan Profil OPD	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
d.	Sumber Daya Manusia	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
e.	Informasi tentang Kedudukan atau Domisili OPD beserta alamat lengkap	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
f.	LHKPN Pejabat yang sudah diverifikasi	Sekretaris Selaku PPID	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy	Selama berlaku	Website
2.	Informasi tentang Kegiatan dan Kinerja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya						
a.	Informasi Program Dan Kegiatan Yang Sedang Berjalan						
	- Nama Program dan Kegiatan	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	- Penanggung jawab dan Pelaksana Program	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	- Target dan Capaian Program dan Kegiatan	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	- Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	- Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) TA. 2017	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	2016	Soft copy	1 tahun	Website
c.	Agenda penting OPD						
	- Rencana Rakor, dll pada SKPD pada th. Berjalan	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	- Agenda penting lainnya	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya						
a.	Ringkasan informasi kinerja berisi progres target dan realisasi pelaksanaan kegiatan setian bulan tahun 2017	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	KA. Sub. Bag Program	Kepala Dinas	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
4.	Ringkasan Laporan Keuangan						
a.	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	KA. Sub. Bag Keuangan	Kepala Dinas	2016	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Neraca	KA. Sub. Bag Keuangan	Kepala Dinas	2016	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
c.	Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku	KA. Sub. Bag Keuangan	Kepala Dinas	2016	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
d.	Daftar Aset dan Investasi	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Selaku PPID	2016	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
5.	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik						
a.	Jumlah Permohonan Informasi Publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
c.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan maupun yang ditolak	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
d.	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
6.	Informasi Mengenai Hak Memperoleh Informasi di OPD						
a.	Tata cara memperoleh informasi publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
b.	Tata cara mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
c.	Tata cara atas tidak ditanggapi/tidak puas jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
d.	Form permohonan dan keberatan	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
7.	Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di OPD						
a.	Alur/Skema Pengaduan (Tata Cara)	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
b.	Form/Lembar Isian Pengaduan	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Kontak Pengaduan ke Pejabat yang berwenang menerima pengaduan dan penyalahgunaan wewenang	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
d.	Hasil penanganan pengaduan	PPID	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
8.	Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	Sekretaris Selaku PPID	Kepala Dinas	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
9.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa						
	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	KA. Sub. Bag Program	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website

B. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Daftar Informasi Publik (2017)	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
2.	Rencana Strategis (2013 s/d 2018)	KA. Sub. Bag Program	Kepala Dinas	Pembuatan 2013 dan Perubahan 2017	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website
3.	SOP Layanan Informasi	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
4.	SOP Laboratorium Pengujian	KA. Seksi Pengujian	KA. Balai BPP	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
5.	SOP Sewa Alat Berat	KA. Seksi Peralatan	KA. Balai BPP	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
6.	Peta Jaringan Jalan Provinsi Prov. Jateng	KA. Seksi Perencanaan	Kabid Ranbangwas	2016	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
7.	Informasi Jalan dan Jembatan	KA. Seksi Perencanaan	Kabid Ranbangwas	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
8.	Daftar Sewa Alat Berat	KA. Seksi Peralatan	KA. Balai BPP	2017	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website

C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Informasi kerusakan jalan dan jembatan akibat longsor dan banjir	KA. Sub. Bag Program	Kabid Ranbangwas	2017	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website

D. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biodata PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	TidakTerbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Dokumen/ Berkas/Arsip PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	TidakTerbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	TidakTerbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	TidakTerbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Daftar nilai DP-3 PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	TidakTerbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data rekam medis PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	TidakTerbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Dapat merugikan PNS • Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Untuk melindungi Keamanan dan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
		Rekam Medis (pasal 10)				kenyamanan PNS
7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dim Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000. 	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
8.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan 	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen
9.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.	Selama proses pengadaan barang/ Jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
10.	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian
11.	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Merugikan ketahanan ekonomi nasional	Sampai selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah
12.	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
13.	Internet Protocol/ IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Melindungi hak akses	Tak Terbatas	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
		Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)				
14.	Bandwith Managament	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Melindungi kestabilan bandwidth	Tak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
15.	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
16.	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf J; - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
17.	Sistem Managemen Database	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf J; - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, ▪ Review Laporan Keuangan, 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 	LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP.	Tak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
		tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a.				
18.	Hasil Laboratorium Pengujian	- SNI ISO/IEC-17025: 2008 Bagian 4.1.5.	Melindungi informasi dan hak pelanggan/pemohon uji	Tak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap informasi pribadi pelanggan/pemohon uji - Melanggar hak kepemilikan pelanggan/pemohon uji - Penyalahgunaan hasil pengujian oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi informasi pribadi pelanggan/pemohon - Melindungi hak kepemilikan pelanggan - Melindungi hasil uji dari penyalahgunaan

Kepala Dinas PU Bina Marga
Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah



[Signature]
Ir. Bambang Nugroho K, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580108 198603 1 013